PENDIDIKAN MULITI-KULTURAL DALAM KOMUNIKASI

Andi Faisal Bakti

I. Konteks

Konflik horizontal yang terjadi antarsuku, agama, ras, golongan dan sejumlah fenomena budaya lainnya, serta konflik vertikal antarmasyarakat dengan pemerintah, merupakan bukti bahwa pendidikan yang berbasis multikultural kurang bertransformasi dengan baik ke setiap warga negara Indonesia. Salah satu upaya preventif untuk membangun kesadaran dan pemahaman generasi masa depan adalah adanya penekanan melalui penerapan pendidikan multikultural tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan di masyarakat yang mempunyai latar belakang kultural yang beragam.

II. Pertanyaan dan Pernyataan

Strategi dan konsep pendidikan multikultural tidak hanya bertujuan agar peserta didik memahami dan ahli dalam disiplin ilmu yang dipelajarinya, akan tetapi, juga: Bagaimana pendidikan mutikultural dalam komunikasi? Dengan kata lain, sejauhmana peserta didik dapat mempraktikkan nilai-nilai komunikasi konstruktif, seperti pluralisme, demokrasi, humanisme dan keadilan terkait dengan perbedaan kultural yang ada di sekitar kita?

Dengan diterapkannya konsep dan strategi pendidikan multikultural, diharapkan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan ketidakadilan yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kultural seperti perbedaan agama, ras, etnis, bahasa, gender, golongan, umur dan kelas dominan dapat diminimalkan.

III. Komunikasi dalam Pendidikan Multikulturalisme

Saat ini masih banyak kita lihat peristiwa konflik, baik konflik antarnegara maupun antardaerah atau suku, organisasi, bahkan agama dan golongan. Munculnya konflik sering disebabkan karena perbedaan ras, suku/etnis, budaya, agama, dan golongan. Menurut teori antropologi, Barth (1969) menyatakan paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas terkait dengan konflik yang sering muncul.

Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. *Kedua*, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan

yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-*back up* kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari *preference* yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antarkelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. *Ketiga*, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum kultural primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.

Dalam sens yang sama, Bakti (2004) juga mengemukakan adanya tiga model, yaitu kulturalis, komunikasionis, dan *peace recognitionist* (pengakuan akan perdamian dan kedamaian). Kelihatannya, dalam pandangan pertama dan kedua Barth di atas, masuk dalam kategori pandangan pertama Bakti, sedangkan pandangan Barth yang ketiga mirip dengan pandangan Bakti yang ke dua. Namun, Barth tidak menyinggung aspek ke tiga seperti dalam pandangan Bakti. Dalam konteks pendapat yang ketiga Barth dan ke dua Bakti ini, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman. Wacana ini mulai ramai terdengar di kalangan akademisi, praktisi budaya, dan aktifis di awal tahun 2000 di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurut mereka, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Namun, dalam konteks perdamaian yang lebih terbuka, kiranya pandangan Bakti yang ke tiga juga perlu pengenalan dan pengembangan, bukan hanya relevan di Indonesia, tetapi mungkin juga secara global yang kelihatannya memiliki kesamaan dalam hal akar konflik dengan bumi Nusantara. Dengan demikian, gabungan atas model di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang ada adalah: kulturalis primordialis instrumentalis, komunikasionis konstruktivis, dan *peace recognitionis*.

A. Pentingnya Pendidikan Multikultural

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Sebagai negara berkembang, menjadikan pendidikan sebagai salah satu sarana strategis dalam upanya membangun jati diri bangsa adalah sebuah langkah yang tepat. Pendidikan multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, umur, dan ras (Tilaar: 2003).

Lebih jauh, Tilaar (2004) mengemukakan pernyataannya berdasarkan beberapa pertimbangan berikut: *Pertama,* pendidikan multikultural secara *inhern* sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, suka

bergotong royong, membantu, dan menghargai antara satu dengan lainnya. Hal ini terlihat dengan masuknya berbagai suku bangsa asing yang terus berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Misalnya etnis Tionghoa, Arab, Eropa, dan sebagainya. Semua suku secara kultural telah mampu beradaptasi dengan suku-suku asli Indonesia, seperti Jawa, Batak, Minang, Bugis, dan lainnya. Proses adaptasi dan akulturasi yang berlangsung di antara suku-suku tersebut dengan etnis yang datang kemudian itu yang dikenal dengan pendidikan multikultural. Hanya saja model pendidikan multikultural ini semakin tereduksi dengan adanya dominasi di bidang politik, ekonomi, dan mulai merambah ke bidang budaya serta peradaban bangsa.

Kedua, pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak konflik di masyarakat. Pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, keadilan, keseteraan, pluralitas dan keragaman, apapun aspeknya dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak memaksakan agar semua manusia harus memiliki berkepribadian sama, berintelektual sama, atau bahkan berkepercayaan yang sama pula.

Ketiga, pendidikan multikultural menentang pendidikan yang beroreintasi bisnis. Pada saat ini, lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi berlomba berbagai jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran komunikasi perdamaian sudah tidak ada lagi. Kekerasan tersebut sebagai akibat dari akumulasinya berbagai lomba, menjadikan lembaga pendidikannya sebagai sebuah institusi yang mampu menghasilkan pemasukan besar. Padahal pendidikan yang sebenarnya diperlukan oleh bangsa Indonesia bukan hanya pendidikan keterampilan belaka, melainkan pendidikan yang harus mengakomodir semua jenis kecerdasan, yang sering dikenal dengan nama kecerdasan ganda *(multiple intelligences)*.

Keempat, pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada persoalan masyarakat yang tidak diselesaikan secara tuntas. Ketuntasan penyelesaian berbagai masalah masyarakat adalah prasyarat bagi munculnya kedamaian. Fanatisme yang sempit juga bisa meyebabkan munculnya kekerasan. Dan fanatisme ini juga berdimensi etnis, bahasa, suku, agama, atau bahkan sistem pemikiran baik di bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik Orde Baru (1966-1998) karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa kita, namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme kultural. Untuk itu, kita perlu menerapkan paradigma pendidikan multikultural untuk menangkal semangat primordialisme kultural (Early dan Ang 2003).

Paradigma pendidikan multikultural dalam konteks ini memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi terhadap budaya dan agama orang lain. Atas dasar ini, maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal

untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamain.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu perhatian dari pasal 4 UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

B. Komunikasi dalam Negara Multikultural

Budaya (*culture*) dan komunikasi tak dapat dipisahkan satu sama lain karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana orang menyandi pesan, namun juga, bahkan ini amat penting, budaya meliputi akan makna yang dimiliki dalam sebuah pesan, bagaimana kondisi untuk mengirimkan, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Karena itu, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam maka beraneka ragam pulalah praktik-praktik komunikasi yang berkembang (Carey, 1989).

Tidak ada proses komunikasi yang berjalan tanpa hambatan. Begitu pun dalam komunikasi antarpersona. Banyak sekali hambatan yang bisa muncul, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Apalagi dalam konteks perbedaan budaya, melakukan komunikasi antarbudaya tidaklah semudah melakukan komunikasi dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang sama dengan kita. Hal ini dikarenakan dua orang yang berasal dari kebudayaan yang berbeda sering kali membawa serta nilai asumsi, ekspektasi, kebiasaan verbal dan nonverbal, dan tata cara berinteraksi yang sesuai dengan kebudayaan dari mana mereka berasal ketika berkomunikasi.

Namun demikian, budaya merupakan pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, sifat perilaku yang dapat dipelajari dan terdapat pada anggota kelompok sosial (Mulyana, 2001). Senada dengan hal itu, Rene Jean Ravault (1992) menyatakan bahwa budaya sebagai keseluruhan dimensi meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat yang sudah mapan. Hal ini juga mencakup bagaimana menghadapi dan beradaptasi dengan tantangan hidup yang ada, dan juga termasuk bagaimana orang menghadapi sesuatu yang asing/ganjil di luar dari kebudayaannya. Misalnya, kelahiran, pertumbuhan, hubungan-hubungan sosial, bahkan kematian.

Salah satu faktor yang dapat menciptakan kondisi multikultural sehingga dapat dipahami masyarakat adalah alat-alat komunikasi yang dirancang dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Tidak mengherankan bahwa kebangkitan semangat kosmopolitanisme dan potensi multikultural bangsa terjadi ketika teknologi komunikasi berkembang. Melalui alat-alat komunikasi dan perhubungan, sebuah gambaran situasi atau citra tentang sesuatu dengan mudah tersebar secara meluas, melampaui batas-

batas geografis, etnis, agama maupun kelas. Hal ini karena dinding partikuralisme lokal baik dalam bahasa, pengalaman, dan gagasan yang selama ini tidak saling bertaut mampu ditembus oleh alat-alat komunikasi modern. Inilah kemudian yang disebut dengan *constructive cultural tendency* atau kecenderungan kultural konstruktif (Bakti, 2004).

Hubungan antarmanusia menurut syariat Islam merupakan dasar yang pokok untuk melangsungkan kehidupan secara harmonis. Hal itu dapat dilihat dari kandungan ajaran Islam sendiri, dalam Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menghargai gender, suku, bangsa dan menekankan ketakwaan dalam bentuk rekognisi satu sama lain.

Sebelum melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa yang akan menjadi sasaran. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah:

1) **Kerangka Referensi**

   Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikan harus disesuaikan dengan kerangka referensi *(frame of reference),* dalam istilah Lee Thayer (1968, 1987), yang mengatakan, bahwa ketika kita akan memberikan pesan harus memperhatikan siapa yang menjadi referensi (tumpuan), sehingga terkomunikasikan apa yang disampaikan. Kerangka referensi seseorang akan berbeda dengan orang lain, ada yang berbeda secara ekstrim seperti antara murid SD dengan seorang mahasiswa atau seorang petani dengan seorang diplomat, intinya kita harus mengetahui sandaran saat berbicara.

2) **Faktor Situasi dan Kondisi**

   Yang dimaksudkan adalah situasi komunikasi pada saat komunikan akan menerima pesan yang disampaikan. Situasi yang dapat menghambat jalannya komunikasi dapat diduga sebelumnya, dapat juga datang tiba-tiba pada saat komunikasi dilancarkan.

   Sedangkan yang dimaksudkan kondisi adalah *state of personality* komunikan, yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat ia menerima pesan komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan tidak akan efektif apabila komunikan sedang marah, sedih, bingung, lapar, sakit, dan lain sebagainya.

   Untuk mengatasi hal semacam itu, suasana yang menyenangkan menjadi penting diperhatikan. Akan tetapi tidak jarang pula komunikasi tetap dilakukan pada saat itu juga, di sini faktor manusiawi sangat penting.

3) **Pemilihan Media Komunikasi**

   Pemilihan media komunikasi juga sangat menentukan keberhasilan efektifitas dan efisiensi komunikasi yang dilakukan, apakah media elektronik, media letak, bisa juga dengan media tradisional seperti kentongan, bedug, pagelaran kesenian, atau media yang sudah modern seperti telepon, telegraf, pamflet, poster, spanduk, dan lain-lain.

Untuk mencapai sasaran komunikasi, yang dapat dilakukan adalah memilih salah satu gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang akan disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan.

4) Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Aktivitas komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dipahami secara benar oleh komunikan. Untuk itu paling tidak ada dua hal yang harus dipersiapkan secara matang dalam melakukan pengomunikasian, hal tersebut yaitu:

a) Fokus pesan (*what to say*);
b) Cara atau pendekatan dalam menyampaikan (*how to say*).

Semakin sederhana dan simpel pesan yang disampaikan meski yang disampaikan kompleks, maka semakin besar kemungkinan audiens memahaminya.

5) Pesan Komunikator dalam Komunikasi

Ada faktor yang penting pada diri komunikator apabila ia melancarkan komunikasi, yaitu:
a) Daya tarik sumber
Komunikan bersedia taat pada isi pesan yang disampaikan oleh komunikator apabila komunikator ikut serta atas apa yang telah disampaikan, sehingga dengan kata lain komunikan merasa ada persamaan dengan komunikator. Di situlah seorang komunikator dikatakan berhasil karena dapat mengubah opini, sikap dan perilaku komunikan.
b) Kredibilitas sumber
Faktor kedua yang dapat menyebabkan komunikasi berhasil adalah kepercayaan komunikan pada komunikator.

Berdasarkan kedua faktor tersebut, seorang komunikator dalam menghadapi komunikan harus bersikap empirik (*empathy*)

IV. Model Komunikasi Antarbudaya

William B. Gudykunst dan Young Yun Kim (1984) mengembangkan model komunikasi antarbudaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya berlainan, atau komunikasi dengan orang asing. Pemikiran ini merupakan pengembangan dari istilah "*intercultural communication"* yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall pada tahun 1959. Model ini mengasumsikan dua orang yang sejajar dalam berkomunikasi, masing-masing dari mereka sebagai pengirim sekaligus penerima atau keduanya sebagai penyandi (*encoding*) dan penyandi balik (*decoding*). Karena hal itulah, kita dapat melihat bahwa pesan dari seseorang merupakan umpan balik untuk yang lainnya. Pesan/umpan balik di antara mereka diwakilkan oleh sebuah garis dari

sandi seseorang kepada sandi balik dari yang lainnya. Dua garis itu menunjukkan bahwa setiap orang dari kita itu berkomunikasi. Kita menyandi dan menyandi balik pesan dalam satu waktu. Dengan kata lain, komunikasi bukanlah hal yang statis, kita tidak akan menyandi sebuah pesan dan melakukan apapun sampai kita mendapat umpan balik.

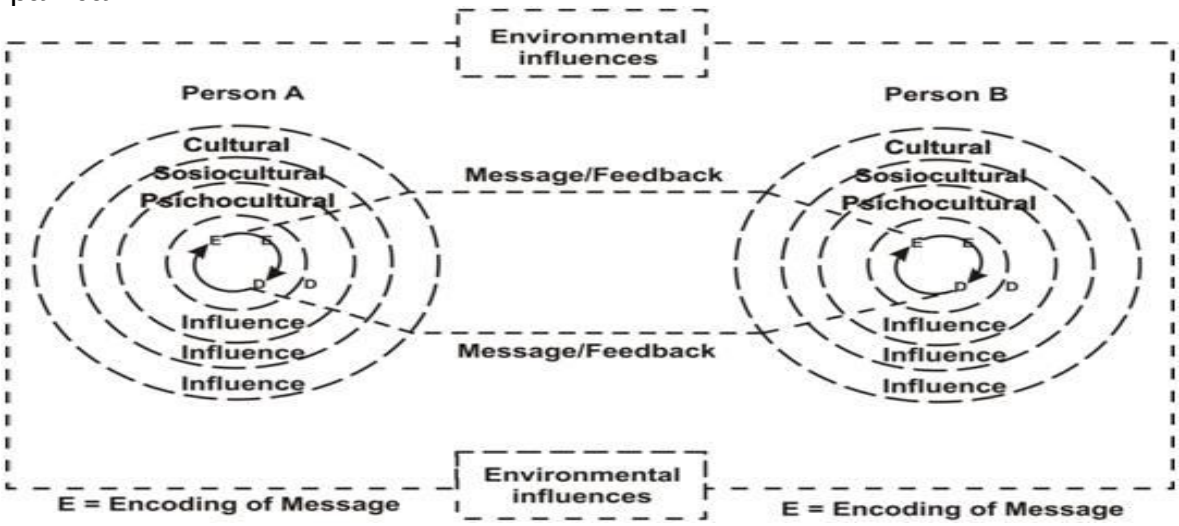

Keterangan:
1. Pengirim (*sender/encoder)* = orang yang memberikan pesan
2. Penerima (*receiver/decoder)* = sasaran/tujuan/penyandi balik
3. Pesan (*messsage)* = sesuatu yang disampaikan atau dikomunikasikan
4. Umpan Balik (*feedback*)

Menurut gambaran Model Komunikasi Gudykunst dan Kim, kedudukan *sender/decoder* dengan *receiver/decoder* adalah sama. Pribadi A dan Pribadi B dapat berperan sebagai pengirim sekaligus penerima. Masing-masing pribadi dapat melakukan penyandian pesan sekaligus penyandian balik pesan. Pesan dari pribadi A dapat juga menjadi umpan balik bagi pribadi B, begitu pula sebaliknya.

Menurut Gudykunst dan Kim, penyandian dan penyandian balik terhadap pesan merupakan suatu proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang dikategorikan menjadi faktor-faktor kultur, sosiokultur dan psikokultur yang nampak pada lingkaran dengan garis putus-putus. Garis putus-putus itu sendiri menggambarkan bahwa ketiga faktor ini saling berhubungan dan memengaruhi. Selain itu, kedua individu yang terlibat juga terletak dalam suatu kotak dengan garis putus-putus yang berarti mewakili pengaruh lingkaran. Hal ini sekali lagi menggambarkan bahwa lingkaran tersebut bukanlah suatu sistem tertutup. Pengaruh kultur dalam model ini meliputi penjelasan mengenai kemiripan dan perbedaan budaya, misalnya pandangan dunia, bahasa, sikap kita terhadap manusia (individualisme atau kolektivisme) yang akan memengaruhi perilaku komunikasi kita.

V. Resolusi Konflik dalam Komunikasi Multikultural

A. Konflik Multikultural

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan banyak budaya bangsa yang ada di dalamnya. Dengan banyaknya budaya yang ada di Indonesia maupun di dunia, maka setiap individu dapat dengan mudah mengenal budaya dan sistem komunikasi dengan budaya yang berbeda. Dalam berinteraksi konteks keberagaman, kebudayaan kerap kali menemui masalah atau hambatan-hambatan yang tidak diharapkan sebelumnya, misalnya dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai-nilai, agama atau norma masyarakat dan lain sebagainya, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Muslim dan Non-Muslim

Menurut Bakti (2008), secara historis, agama yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Yang pertama diadopsi oleh kerajaan Sriwijaya (abad 7-9) dan kedua kerajaan Majapahit (abad 9-14).

Pada abad ke-7, para pedagang Muslim yang juga adalah guru agama atau Sufi datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam.

Pada abad ke-10, umat Islam mulai membangun diri di wilayah pesisir dan mengadakan pernikahan campur dengan penduduk setempat. Islam mulai menyebar dan berdirilah berbagai pusat keagamaan, termasuk masjid. Dari abad ke-13 muncullah kerajaan Islam antara lain di Aceh (Sumatera), Mataram (Jawa), Gowa Tallo-atau Makassar (Sulawesi), Ternate Maluku), dll.

Abad ke-16, Indonesia mulai didatangi oleh bangsa Eropa yang ingin mencari rempah-rempah. Tujuan kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang, namun juga untuk menyebarkan agama Kristen, dan mengeksploitasi kekayaan Indonesia untuk sumber daya mereka seperti yang dinyatakan oleh Harrison (1990: 616):

> *Another motivating factor in the new imperialism was the evangelizing zeal of the Christian religion. Christianity had long taken to heart the command, 'Go ye into all the world and preach the gospel to every creature.' At the very time that Christianity was wavering under attack in its homeland in the West, it was carrying on foreign missionary activity of unprecedented scope and intensity. More often than not, where the missionaries went, so went Western explorers, traders, troops, and officials*.

Dengan demikian, Kristenisasi dan kolonisasi identik dengan perdagangan di Indonesia. Portugis menyebarkan agama melalui pemaksaan sehingga banyak orang yang berpindah keyakinan di Timor Timur (Timor Leste). Sementara itu dalam masa penjajahannya, Belanda menggunakan strategi yang lebih halus. Mereka menggunakan rayuan dan iming-iming kekuasaan ekonomi dan politik. Politik *devide et impera* merupakan salah satu strategi mereka.

Belanda juga membagi strata sosial penduduk yang merupakan awal konflik antara kelompok pribumi dan non-pribumi saat ini. Mereka membagi kelas sosial menjadi: 1) kelas elit, meliputi semua keturunan Eropa dan Indo-Eropa; 2) kelas menengah,

termasuk keturunan Asia Timur (Tionghoa); dan 3) penduduk pribumi, terlepas dari strata sosial (anggota keluarga kerajaan, bangsawan serta rakyat jelata).

Kehadiran dan penyebaran agama Kristen di negeri ini, menurut catatan sejarah, terjadi karena adanya perlindungan pemerintah kolonial Belanda. Akibatnya, Kristen sampai hari ini cenderung dikaitkan dengan kolonialisme dan dengan elit penguasa.

Tidak seperti Muslim, Kristen Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dan mendapatkan status kelas kedua/menengah. Sebagian besar dari mereka banyak yang berpindah keyakinan dari pemeluk agama Buddha menjadi pemeluk agama Kristen. Hal ini makin memperkuat kedudukan mereka selama masa kolonial.

Di bawah rezim Soeharto yang terdiri atas mayoritas Muslim, banyak orang Kristen yang menduduki “tempat basah” dan memegang peranan penting dalam kabinet pemerintahan. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan makin merenggangkan jarak antara warga Muslim dan non-Muslim. Kondisi ini diperburuk dengan adanya anggapan bahwa umat Kristen melakukan penyebaran agama dengan menargetkan pada umat Muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Iming-iming uang dan hidup yang lebih baik telah membuat banyak Muslim berpindah agama memeluk agama Kristen.

Di sisi lain, sebagai agama minoritas, umat Kristen merasa umat Muslim sering bersikap sewenang-wenang terhadap mereka. Kasus penutupan gereja, atau yang saat ini sedang hangat terjadi misalnya, terkait banyak yang menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur dikarenakan umat Muslim tidak mau dipimpin oleh orang yang berbeda agama (dalam hal ini, Ahok adalah pemeluk agama Kristen), membuat isu antaragama ini mencuat.

Dalam mengatasi konflik seperti ini, para pemuka agama baik Muslim maupun non-Muslim dapat menggunakan konsep *recognitionism* atau di dalam Islam disebut *al-ta‘aruf.* Mereka harus bertemu dan mengadakan diskusi secara komprehensif untuk mencari jalan perdamaian. Semua pihak tidak boleh bersikeras memaksakan kehendak. Tidak boleh ada istilah agama “mayoritas” ataupun “minoritas. Semua pemuka agama harus menyerukan perdamaian dan menjadi panutan bagi para umat mereka demi tercapainya stabilitas nasional (Bakti: 2004).

2. Pemerintah Pusat dan Daerah (Jawa dan Non-Jawa)

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan semenjak zaman kolonial Belanda. Banyak pemimpin yang berasal dari suku Jawa. Suku merekalah yang mendapatkan perhatian utama sejak zaman penjajahan Belanda.

Presiden pertama, Soekarno, adalah orang Jawa. Demikian juga dengan presiden kedua, Soeharto. Presiden ketiga, B. J. Habibie, memang bukan orang Jawa. Namun ia menggantikan kedudukan Soeharto yang diturunkan secara paksa. Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, juga orang Jawa. Megawati yang merupakan anak Soekarno,

menjadi presiden kelima. Kondisi ini terus berlangsung dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai presiden keenam dan ketujuh.

Dalam Bakti (2008), saat zaman pemerintahan Soeharto, terjadi banyak pemberontakan di daerah luar Jawa. Hal ini terjadi diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Akibatnya, banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia.

Adanya program transmigrasi yang digagas oleh Soeharto juga menimbulkan keresahan bagi penduduk luar Jawa. Mereka semakin merasa terdominasi oleh kehadiran orang Jawa. Akibatnya, muncullah konflik kebencian pada warga pendatang yang dianggap merebut lahan penduduk asli. Di pihak lain, dengan program keluarga berencana (KB) membuat pulau-pulau di luar Jawa semakin tidak berkembang jumlah penduduk aslinya. Warga dari pulau Jawa didatangkan dengan alasan kepadatan penduduk dan kemiskinan terjadi di Jawa, namun pulau yang didatangi juga warganya pun miskin dan tidak diberikan lahan dan peralatan pertanian beserta insektisida dan dan pestisida. Ini kemudian melahirkan kekecewaan di pihak penduduk asli.

Untuk mengatasi konflik ini, pemerintah harus menggunakan strategi komunikasi *negotiation*, atau yang juga dikenal sebagai musyawarah (*shura*) dengan mengedepankan semangat negara persatuan dan merangkul pemerintah daerah beserta seluruh penduduk Nusantara tanpa terkecuali. Pembangunan harus merata. Darerah tertinggal harus dimajukan. Dan pemerintah harus mau membuka jalur komunikasi untuk mendengarkan para tokoh masyarakat agar mengetahui aspirasi mereka (Bakti: 2004).

3. Militer dan Warga Sipil

Dalam catatan sejarah, hubungan sipil-militer di Indonesia kerap terganggu. Sejak perekrutan serdadu di era kolonial Belanda dan Jepang, menyisakan persoalan dalam hal klaim hak pengelolaan negeri ini. Ini berlanjut hingga di tahun 1959 Soekarno menggagas dualisme ABRI/TNI. Fungsi pertama adalah untuk melindungi negara dari ancaman luar. Fungsi yang kedua adalah untuk menjaga kestabilan jalannya pemerintahan nasional. Namun pada kenyataannya, fungsi yang kedua berperan lebih dominan dibandingkan fungsi yang pertama, terutama di bidang politik dan ekonomi, bahkan kultur (Bakti: 2008).

Banyak pengusaha keturunan Tionghoa yang berkolusi dengan petinggi militer untuk memperkuat dan melindungi kekuatan bisnis mereka. Mereka melakukan monopoli atas berbagai komoditi dan sumber daya alam vital di negeri ini. Hal ini yang disebut oleh Robison (1986) sebagai "*crony-capitalism*." Akibatnya, muncul kebencian terhadap birokrat, militer, dan warga negara keturunan Tionghoa karena dianggap merupakan mata rantai dari kolusi penguasa ekonomi negara ini.

Untuk meredam konflik ini, pemerintah tidak lagi boleh menggunakan militer bertangan besi yang ditujukan hanya untuk pihak tertentu saja. Fungsi militer haruslah mengayomi masyarakat dan menjadi pelindung bagi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Penggunaan strategi komunikasi *egaliter* (*musawa*) sangat perlu untuk diterapkan (Bakti: 2004).

4. Penguasaha Asing dan Lokal (Keturunan Tionghoa dan Pribumi)

Dalam Bakti (2008) dikatakan bahwa penduduk Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori: penduduk asli (pribumi), penduduk yang memilki darah keturunan asing (Tionghoa, Arab, Eropa, India dan lainnya), serta warga negara asing yang memang memiliki kartu tanda penduduk dari negara lain. Pengusaha keturunan Tionghoa termasuk ke dalam kategori kedua.

Hubungan kekerabatan para pengusaha keturunan Tionghoa ini sangat erat. Mereka saling bantu-membantu satu sama lain. Di lain pihak, mereka mendirikan tembok pemisah antara kelompok mereka dan pengusaha pribumi. Ada eksklusivitas dalam kelompok mereka yang terlihat begitu menyolok.

Para pengusaha Tionghoa tersebut meduduki hampir 70% kunci penting dalam perekonomian, seperti bankir, investor, hotel, restoran, took ritel, atau perusahaan kelas kakap yang banyak memegang tender vital dalam bisnis negeri ini. Mereka tidak sering berinteraksi dengan penduduk pribumi. Jika pun ada, warga pribumi biasanya hanya memiliki status terendah dalam interaksi tersebut, seperti menjadi buruh, supir atau pembantu mereka, yang sering melahirkan kisah perlakuan tidak berkeprimanusiaan oleh majikan kepada bawahan.

Tidak seperti warga keturunan lainnya seperti Arab dan India, warga keturunan Tionghoa yang umumnya memeluk agama Kristen tidak berasimilasi sebaik warga negara keturunan lainnya dengan penduduk pribumi yang mayoritas beragama Islam. Perbedaan agama ini juga turut menyumbangkan akar konflik, terlepas dari eksklusivitas yang diuraikan di atas.

Pemerintah harus berupaya menjembatani dialog-dialog antaretnis (Tionghoa dan pribumi) untuk dapat saling membuka diri jika ingin meredam konflik ini. Gunakan teori komunikasi *creation and trust in foreigners* atau di dalam Islam disebut dengan *al-amanah (*kepercayaan*)*. Adakan berbagai kegiatan kerjasama yang melibatkan kedua etnis sehingga dapat perlahan mengikis prejudice dan jurang pemisah di antara keduanya. Libatkan tokoh dan pemuka agama yang dihormati dan didengarkan oleh kedua etnis. Kedua belah pihak harus mau belajar memaafkan kejadian masa lalu dan membuka lembaran baru menuju keharmonisan (Bakti: 2004).

5. Kelompok Sekular dan Religius

Menurut Bakti (2000a), kelompok sekuler berawal dari zaman penjajahan Belanda. Mereka adalah sekelompok orang pilihan yang dikirimkan ke Eropa oleh pemerintah Belanda yang sebenarnya bertujuan untuk “dididik” dan kemudian kelak membantu Belanda menundukkan Indonesia. Namun pada kenyataannya, kelompok ini justru memiliki pemikiran sendiri. Di sisi lain, kelompok religius juga tak kalah kuatnya. Mereka mengirimkan kader mereka untuk bersekolah di Timur Tengah dan memperdalam agama Islam.

Namun dalam perjalanan saat ini, kelompok religius merasa dikhianati oleh kelompok sekuler yang menduduki posisi dalam politik pemerintahan atas berbagai kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama. Beberapa di antaranya, juga ada yang ingin mencoba mengambil alih pemerintahan, baik melalui partai Islam, ataupun melalui pemaksaan secara sporadis. Munculnya partai-partai di Indonesia selalu berdasarkan ajaran agama atau pandangan keduniaan. Perbedaan ini juga kerap melahirkan konflik vetikal dan horizontal.

Untuk mengatasi konflik ini, teori komunikasi *reformism* atau yang dikenal dengan *ihsan* dalam agama Islam harus diterapkan. Kedua kelompok baik sekuler maupun religius harus bersedia duduk bersama dan memiliki tujuan yang sama: kemajuan bangsa. Betapa pun berbedanya pandangan tiap kelompok, tapi rasa cinta tanah air haruslah dikedepankan. Situasi yang kondusif antarkelompok sangat diperlukan agar pergesekan anggota tiap kelompok bisa diminimalisir (Bakti: 2004).

6. Kelompok Muslim Modern dan Tradisional

Kelompok Muslim modern dan tradisional memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengimbangi pengaruh kelompok sekular. Kelompok modern biasanya memperoleh pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal, dan kelompok tradisional biasanya memperoleh pendidikan dari pesantren.

Kelompok Muslim modern yang terkemuka di Indonesia adalah Muhammadiyah, dan kelompok tradisional diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun tetap berusaha berjalan di koridor yang sama dalam menentang kaum sekular, namun pergesekan akibat perbedaan pandangan di antara Muhammadiyah dan NU menjadi konflik yang tidak terhindari. Perbedaan nilai dalam menjatuhkan tanggal mulai berpuasa Ramadhan dan 1 Syawwal, mauled/Barzanji, dan persoalan khilafiah lainnya, sering menjadi isu perselisihan yang berujung pada ketegangan di antara pengikut kedua kelompok.

Konflik kedua kelompok ini dapat diatasi bila kedua belah pihak mau menyadari bahwa sebenarnya mereka memilki tujuan dan kepentingan yang sama. Teori komunikasi *global communitarianism (ummah* dan *qawm)* dapat diterapkan mengingat bahwa: walaupun cara pandang dalam memandang sesuatu hal kadang berbeda, namun pada dasarnya kedua kelompok ini memiliki pondasi dan kesaman tujuan dalam beribadah (Bakti: 2004).

7. Perbedaan Gender

Indonesia dapat dikatakan terpengaruh budaya patriarki dari Arab dan China. Perempuan sebagai istri cenderung dianggap warga kelas dua. Di Indonesia, umumnya dikenal sebagai lelucon bahwa perempuan secara khusus disiapkan untuk melakukan 4 pekerjaan “Ur” (Sumur untuk untuk mencuci, dapur untuk memasak, bubur untuk memberi makan bayi, dan kasur untuk kenikmatan seksual laki-laki). Di tempat kerja, wanita juga diperlakukan sebagai kelas dua. Perempuan sangat jarang menduduki posisi tinggi. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai guru, karyawan manufaktur, atau hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan kerap mengalami perlakuan tidak wajar. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan contoh gamblang persoalan ini.

Konflik yang sudah lama terjadi ini dapat diatasi apabila sedari dini pemerintah melalui lembaga pendidikan mengajarkan nilai-nilai persaman hak antara laki-laki dan perempuan kepada peserta didik. Tidak ada pembedaan perlakuan antara kedua gender. Teori komunikasi *penser sa culture* dan equalitas dapat diterapkan di sini untuk mengubah paradigma yang telah berlangsung selama ini. Berbagai penyuluhan di tingkat keluarga melalui Rukun Warga juga dapat menjadi solusi yang baik. Adakan program pemberdayaan perempuan dan ibu rumah tangga, serta galakkan pengajaran kepada remaja perempuan yang putus sekolah sehingga mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri (Bakti: 2004).

8. Kelompok Muslim Mayoritas dan Kelompok Sempalan

Istilah "*gerakan sempalan*" beberapa tahun terakhir ini menjadi populer di Indonesia sebagai sebutan untuk berbagai gerakan atau aliran agama yang dianggap "aneh," alias menyimpang dari aqidah, ibadah, amalan atau pendirian mayoritas umat. Istilah ini, agaknya, terjemahan dari kata "*sekte*" atau "*sektarian*" kata yang mempunyai berbagai konotasi negatif, seperti protes terhadap dan pemisahan diri dari mayoritas, sikap eksklusif, pendirian tegas tetapi kaku, klaim monopoli atas kebenaran, dan fanatisme.

Di Indonesia ada kecenderungan untuk melihat gerakan sempalan terutama sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dan untuk segera melarangnya. Hampir semua aliran, faham dan gerakan yang pernah dicap "*sempalan*" telah dilarang atau sekurang-kurangnya diharamkan oleh Majelis Ulama. Beberapa contoh yang terkenal adalah: *Islam Jamaah*, *Ahmadiyah Qadian*, *DI/TII*, *Mujahidin*-nya Warsidi (Lampung), *Syi'ah*, *Baha'i*, *Inkarus Sunnah*, *Darul Arqam* (Malaysia), dan lainnya.

Menjamurnya kelompok-kelompok sempalan dalam agama merupakan akibat situasi rentan masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial budaya, kesenjangan dan deprivasi ekonomi, dan efek globalisasi yang berujung pada konflik

sosial. Karena sikap dan cara kelompok sempalan itu, maka peningkatan konflik sosial bernuansa agama kian merebak. "Konflik sosial itu terjadi lantaran sekte atau ajaran keagamaan itu menyempal dari agama induknya. Akibatnya muncul reaksi keras dari kelompok mainstream dalam agama" (Azra: 2013).

Konflik yang terjadi karena hadirnya berbagai kelompok sempalan dapat diatasi bila pemerintah menyelesaikan akar rumput penyebab berdirinya kelompok tersebut. Seperti yang dinyatakan Azra (2013) di atas, berbagai kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi salah satu faktor kemunculan kelompok ini harus diminimalisir. Jurang kemiskinan harus diperkecil dengan pengadaan program kemandirian bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada pemerintah, namun juga dapat mandiri secara *bottom-up* dengan memberdayakan diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar (Bakti: 2004).

Buka saluran komunikasi berlandaskan teori komunikasi *interpretation of sciptures* atau yang dikenal dengan *ijtihād* dan kemblikan pada dasar awalny, duduk sama rata sama rasa, antara pemuka agama, tokoh masyarakat, dan warga yang bermukim di seluruh wilayah negeri. Adakan penyuluhan dan penguatan nilai-nilai agama agar tiap pemeluk agama bukan saja menghafal ayat-ayat kitab suci mereka, namun juga memahami makna yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak ada celah bagi pihak tertentu untuk masuk dan membentuk kelompok sempalan (Bakti: 2004).

B. Peran Komunikasi dalam Pendidikan Multikultural

Menurut Furnivall (1948, 1967), ciri utama masyarakat multikultur adalah orang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial budaya mereka terpisah dan tidak bergabung dalam suatu unit komunitas. Dalam masyarakat multikultural inilah proses komunikasi antarbudaya terjadi di antara orang-orang dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda (agama, ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini).

Pengajaran ilmu komunikasi dalam pendidkan multikultural merupakan suatu proses pembelajaran berjenjang yang mampu menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi konflik dari berbagai perbedaan multikultural yang diuraikan di atas agar tercipta kepribadian yang cerdas, bijak, dan santun dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman.

Paradigma komunikasi multikultural sangat bermanfaat untuk membangun harmonitas sosial di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara masyarakat Indonesia. Mengingat kompleksitas pluralitas dan multikulturalitas di Indonesia dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas, maka diperlukan strategi khusus untuk memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang; terutama pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, maka komunikasi berbasis multikultural menawarkan solusi melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menjadi sasaran utama basis komunikasi multikultural dikarenakan civitas akademika menjadi sentral penggodokan pelbagai ilmu dan sains lewat banyak sudut pandang, perspektif dan berbagai aliran. Pengungkapan pelbagai ilmu dari banyak sudut pandang ini memerlukan satu pengertian yang sama, yakni untuk mencari kebenaran sebuah ilmu. Di sinilah peran komunikasi dapat dijadikan sandaran utama, agar proses dialog, diskursus antar perspektif ilmu pengetahuan dan sains yang berbeda menjadi terjembatani. Oleh karenanya itu, para pendidik dituntut tidak hanya menguasai dan mampu secara profesional mengajarkan mata kuliah yang diajarkan, namun lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagamaan yang inklusif pada mahasiswa, lewat pendekatan komunikasi multikultural. Sehingga tujuan akhirnya adalah *output* yang dihasilkan tidak hanya kompeten sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai keberagamaan dalam memahami dan menghargai keberadaan perbedaan yang ada.

VI. Kesimpulan

Kebutuhan akan ilmu komunikasi dalam pendidikan multikultural tidak dapat terbantahkan lagi urgensinya. Terlepas dari masyarakat Indonesia yang memang sangat majemuk dan beragam, pengaruh globalisasi yang memungkinkan berbagai macam orang dari budaya luar bercampur dan datang untuk bergaul dengan budaya lokal pun, membuat kita harus semakin bijak dalam menghadapi perbedaan.

Berbagai konflik multikultural yang terjadi dan diuraikan di atas sebenarnya dapat diatasi melalui pengajaran ilmu komunikasi yang dibingkai dalam pendidikan multikultural. Setiap pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu yang berlandaskan pendidikan multikultural semenjak dini sehingga kerukunan antarbudaya dapat tercipta.

Hendaknya pengajaran ilmu komunikasi multikultural yang dilakukan pada pembelajaran di institusi pendidikan tidak hanya ada pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama saja, melainkan juga dapat pula diintegrasikan dengan mata pelajaran lain termasuk dalam berbagai kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi (2013). *Konflik Sosial Menjamur Karena Eklusivisme Kelompok Sempalan.* Diunduh pada 15 November 2014 dari

http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2615-prof-dr-azyumardi-azra-ma-konflik-sosial-menjamur-karena-eklusifisme-kelompok-sempalan.html

Barth, Fredrik (ed.) (1969). *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little, Brown.

Bakti, A. F. (2000a). *Islam and Nation State Formation in Indonesia: From Communitarian to Organizational Communications*. Jakarta: logos.

------- (2008). "Communication and Violence: Communicating Human Integrity Characteristics is Necessary for Horizontal Conflict Resolution in Indonesia," *Identity, Culture, and Politics* Vol. 9, No. 1 (July 2008): 74-114.

---------. (2004). *Communication, Islam and Development*. Leiden: INIS.

Carey, James (1989). *Comunication As Culture*: *Essays on Media and Society.* New York: Routledge.

Early, P. C. dan S. Ang, (2003). *Cultural Intelligence*. Stanford, CA: Stanford U. Press.

Furnivall, J. S. (1948). *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. Cambridge: Cambridge University Press.

------- (1967). *Nederlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gudykunst, William B. and Kim, Young Yun (1984). *Communication with Strangers. An Approach to intercultural communication.* New York: Random House.

Harrison, J. B, *et al.,* 1990. *A Short History of Western Civilization*. New York:McGraw-Hill.

Mulyana, Deddy (2001). *Human Communication: Konteks-Konteks Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

-------- 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ravault, R. J. (1992). “Down to Eartt Communication: From Space Technologies and Golbal Economies to … Petty Humans and Thewir Parochial Cultures*! Canadian Journal of Communication* 17: 531-43.

Robison, R. 1 986. *Indonesia: The Rise of Capitalism*. Sydney: Alien & Unwin.

Tilaar, H.A.R. (2003). *Manajemen Pendidikan Nasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

-------- 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Taransformsi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Thayer, Lee (1968). *Communication and Communication Systems in Organization Management, and in Interpersonal Relations*. Homewood III: Richard Irwing.

--------. (1987). *On Communication: Essays in Understanding*. Norwood, New Jersey: Ablex Publication Co.